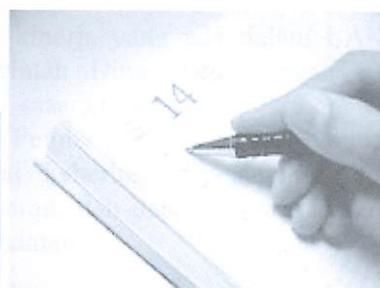
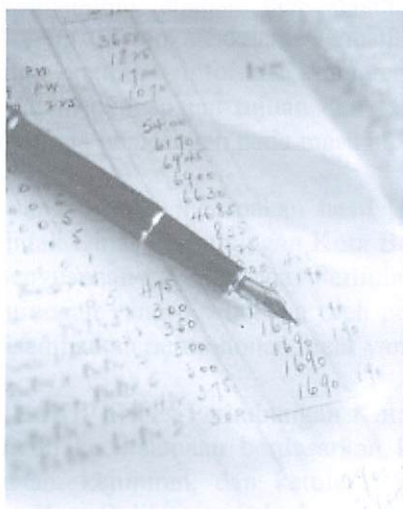


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Tahun 2013



Dinas Perhubungan Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telepon (0542) 896291, Fax.(0542) 876290 Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I No. 5 Telepon (0542) 896291, Fax.(0542) 876290 Balikpapan



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Penyusunan LAKIP tahun 2012 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum.

LAKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada dalam LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2012. LAKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya yaitu Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, swasta dan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2012 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh pelbagai keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.

Selanjutnya diharapkan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2012 ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan selanjutnya.

Kami berharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun berikutnya.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua.

Balikpapan, Februari 2013
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

SUSENO, A.Td
NIP. 19630505 198303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
1. Pembentukan	1
2. Tugas Pokok	1
3. Fungsi	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	5
D. SARANA DAN PRASARANA	6
E. KEADAAN UMUM WILAYAH.....	6
1. Geografis	6
a. Letak Geografis.....	6
b. Topografi dan Fisiografi	6
F. KONDISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. Visi.....	7
2. Misi	8
B. TUJUAN DAN SASARAN	8
1. Tujuan	8
2. Sasaran	8
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	8
1. Strategi dan Kebijaksanaan	8
2. Program Operasional	9
3. Kegiatan	10
D. RENCANA KINERJA TAHUN 2013	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
ASPEK KEUANGAN	16
BAB IV PENUTUP.....	22
LAMIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Pembentukan

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Dasar pembentukan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 27 Mei 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah pada Pasal 21, Dinas Perhubungan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan program perhubungan
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemantauan dan analisa kelayakan
- c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan
- d. Pemberian layanan perizinan dan rekomendasi perizinan
- e. Evaluasi dan Pelaporan
- f. Tugas Lain

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kabid, 3 (tiga) Kasubbag, 8 (delapan) Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
- Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian Operasional
 - c. Seksi Prasarana, Teknik Sarana dan Angkutan
- Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel membawahi :
 - a. Seksi Kepelabuhanan
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lalu Lintas Angkutan Laut
 - c. Seksi Perhubungan Udara dan Postel
- Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan :
 - a. Seksi Rekayasa Jaringan Transportasi
 - b. Seksi Seksi Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- Jabatan Fungsional untuk Penguji Kendaraan Bermotor

Adapun tugas dari masing-masing perangkat Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, meliputi : perhubungan darat, perhubungan laut, udara, dan pos telekomunikasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan pemberian layanan perizinan dan atau rekomendasi perizinan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- f. pengelolaan manajamen bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi;
- h. pembinaan teknis bidang perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi serta sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Perhubungan Darat

- (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perhubungan darat meliputi manajemen dan *rekayasa lalu lintas*, manajemen angkutan dan terminal, sarana dan prasarana lalu lintas, *analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas*, serta pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas.
- (2) Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat membawahkan seksi yang dipimpin seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan penumpang dan barang;
- b. pelaksanaan pemberian layanan izin trayek angkutan kota, izin operasi angkutan yang melayani wilayah kota dan rekomendasi izin trayek/operasi angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. *penentuan lokasi*, pelaksanaan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan;
- d. *penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta andalalin di jalan kota*;
- e. pelaksanaan pembinaan sekolah mengemudi;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan serta penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- g. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan;
- i. pelaksanaan pemberian layanan sertifikasi pengemudi angkutan umum dan barang;



- j. pelaksanaan pemberian layanan izin, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
- k. *pelaksanaan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi, bengkel umum kendaraan bermotor dan pengawasannya;*
- l. pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. pengoperasian fasilitas parkir di jalan;
- n. pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang dan barang;
- o. pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang lalu lintas, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
- p. pelaksanaan pembinaan operasional pengujian kendaraan bermotor, perparkiran dan terminal;
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan bidang kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan serta urusan perhubungan udara, pos telekomunikasi.
- (2) Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Pos Telekomunikasi membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bidang perhubungan laut, udara dan pos telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi dan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan umum, khusus, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi, pembangunan pelabuhan dan penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP serta DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional, nasional, regional dan lokal;
- d. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat keselamatan (rambu-rambu), angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. *penerbitan izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;*
- f. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota serta izin pengerukan dan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan lokal, regional, nasional, dan internasional;
- g. pemberian izin pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota;
- h. pengawasan pelaksanaan tarif dan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan lintas kota;
- i. penetapan, pengawasan pelaksanaan tarif dan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dalam kota;
- j. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam wilayah kota;
- k. pelaksanaan pemberian layanan surat izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPP) dan surat izin operasi perusahaan non pelayaran serta surat izin usaha perusahaan pelayaran rakyat (SIUPPER) dalam kota;
- l. pemberian rekomendasi/izin di bidang perhubungan laut, udara, pos dan telekomunikasi;
- m. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, pengawasan, pemeriksaan penertiban surat persetujuan berlayar (SPB), sertifikat keselamatan dan dokumen pengawasan serta tanda kebangsaan;
- n. pelaksanaan pemberian layanan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- o. pelaksanaan pemberian layanan izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kota dan izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G).
- p. pemberian layanan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota dibidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi, pos dan telekomunikasi serta perhubungan udara;
- q. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan tinggi;
- r. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi penetapan lokasi dan pembangunan bandara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk;
- s. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan

- (1) Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan.
- (2) Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perancangan Teknis dan Evaluasi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang perhubungan;
- b. penyusunan dan penetapan rencana jaringan umum transportasi jalan dan rencana umum lintas penyeberangan;
- c. penyusunan usulan lokasi dan rancang bangun terminal penumpang dan barang;
- d. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
- e. penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan jaringan lintas angkutan barang;
- f. penyusunan rencana rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan andalalin;
- g. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelabuhan, terminal dan parkir umum;
- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan transportasi; penyusunan kebijakan teknis penetapan tarif jasa terminal penumpang/barang, tarif penumpang angkutan/taxi dalam kota dan angkutan SDP dalam kota serta tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah kota;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan jaringan transportasi, pelabuhan, terminal, trayek angkutan, perlengkapan jalan dan fasilitas parkir umum di wilayah kota;
- j. pengumpulan dan pengolahan data hasil survey dan kajian di bidang perhubungan darat, laut, udara dan postal;
- k. penyediaan dan pemeliharaan dokumen/data/informasi dibidang perhubungan darat, laut, udara dan postal yang telah diolah;
- l. pengoordinasian pengolahan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data, dan sistem informasi di bidang perhubungan darat, laut, udara dan postal;
- m. pengkajian pengembangan sistem informasi dan pengendalian lalu lintas, jaringan transportasi dan trayek angkutan, serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- n. penyusunan laporan periodik pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan darat, laut, udara dan postal;
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.



C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan per Desember 2013 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang yang terdiri dari 148 (seratus empat puluh delapan) pegawai negeri, 1 (satu) orang pegawai honor daerah, 1 (satu) orang pegawai tenaga harian lepas dan 6 (enam) tenaga bantuan, 3 (tiga) orang pramu taman, 11 (sebelas) petugas kebersihan, 11 (sebelas) penjaga malam dan 53 (lima puluh tiga) juru parkir.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan sengan SDM yang ada, maka jumlah tersebut belum mencukupi berdasarkan beban kerja yang ada masih kurang sarjana dibidang transportasi.

Tabel 1. : keadaan Pegawai Per 31 Desember 2013

Pangkat/ Gol Ruang				Pendidikan								Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SMP	SD	
5	24	100	17		5	11	4	2	79	8	7	PNS
									28	8		CPNS
									1			HONDA
											1	THL
							2	4				NABAN
									31	6	16	JURU PARKIR

Daftar : Daftar Jumlah Pegawai Dinas Perhubngan Per 31 Desember 2013

No	Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	148
2	Honda	1
3	THL	1
4	Tenaga Bantuan	6
5	Pramu Taman	3
6	Petugas Kebersihan	11
7	Penjaga Malam	11
8	Juru Parkir	53
	Jumlah	234

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan SDM yang ada, maka jumlah tersebut belum mencukupi untuk mencover pekerjaan yang ada terutama untuk pegawai yang ada dilihat dari segi kualitas dan segi kuantitasnya terutama untuk tenaga staf yang terampil mengingat kebutuhan akan pelayanan tranportasi darat dan pekerjaan yang semakin komplek, untuk itu dibutuhkan tenaga yang terampil.

D. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Sarana dan Prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir Desember 2013 sarana kerja yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah seperti pada tabel berikut :

1. Sebidang tanah dan Bangunan kantor sekretariat : 13.761, 12 m2
2. Terminal Batu Ampar : 13.671,12 m2
3. Sebidang tanah dan Bangunan UPT PKB : 4.582 m2
4. Kendaraan Dinas Roda 6 : 2 Unit
5. Kendaraan Dinas Roda 4 : 19 Unit
6. Kendaraan Dinas Roda 2 : 82 Unit

E. KEADAAN UMUM WILAYAH

1. Geografis

a. Letak Geografis

Kota Balikpapan dengan luas wilayah 50.330 Ha atau 503,30 Km² termasuk kawasan hutan lindung 15.000 H, terletak pada 1° LS - 11° LS dan anatar 116,5° BT – 117,5° BT dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasir.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

b. Topografi dan Fisiografi

Wilayah Kota Balikpapan didominasi topografi yang bergelombang dari kemiringan landai sampai curam. Dengan ketinggian perbukitan antara 0,00 meter sampai dengan 100 meter dari permukaan laut (dpl). Daerah dataran rendah pada umumnya pada kawasan pantai dan pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan terdapat di bagian barat laut dan utara.

Secara garis besar dari 50.331 Ha luas wilayah Kota Balikpapan 4.559,99 Ha (9,06%) digunakan untuk pemukiman 9.385,36 Ha (18,65%) penggunaannya untuk pertanian, 14.565,20 Ha (28,94%) termasuk sebagai kawasan hutan dan 21.820,02 Ha (43,35 %) untuk lain-lain kegiatan.

F. KONDISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN

a. Jumlah sarana Angkutan :

• Jumlah Kendaraan	: 449.832 Unit	
• Jumlah Angkutan Kota	: 1.986	unit
• Jumlah Taksi	: 330	unit
• Jumlah bus	: 305	unit
• Jumlah Minibus	: 30	unit

b. Jumlah Prasarana Lalu Lintas :

❖ Panjang Jalan : 632.890 Km	
❖ APIL	
✓ ATCS	: 13 unit
✓ APILL	: 24 unit
✓ Pelican crossing	: 2 unit
✓ Pelican Ktr Pertamina	: 2 unit
✓ Flashing	: 2 unit
✓ Flashing smpng Pelyaran	: 1 unit
✓ APILL ktr Pertamina	: 1 unit
❖ Rambu Lalu Lintas	: 1.354 buah
❖ Luas Marka	: 59.854,01 m ²
❖ Panjang Guard Rile	: 650 m
❖ Pita Penggadu	: 23 lokasi
❖ Halte	: 24 buah



BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visi dan Misi

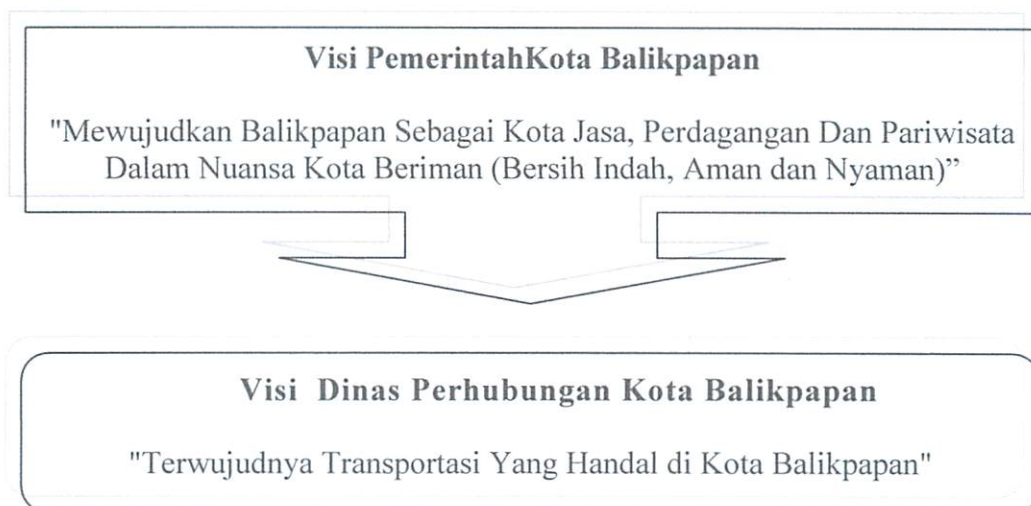
1. Visi

Visi Pemerintah Kota Balikpapan, “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata dalam nuansa kota Beriman maka Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan visinya adalah :

“Terwujudnya Transportasi Yang Handal di Kota Balikpapan”

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada stakeholdernya yaitu perusahaan jasa angkutan dan masyarakat pada umumnya harus memenuhi keinginan dan tuntutan berupa pelayanan dan pengaturan pelayanan transportasi yang lancar, cepat, dan nyaman.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Visi Pemerintah Kota Balikpapan dan Visi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut:

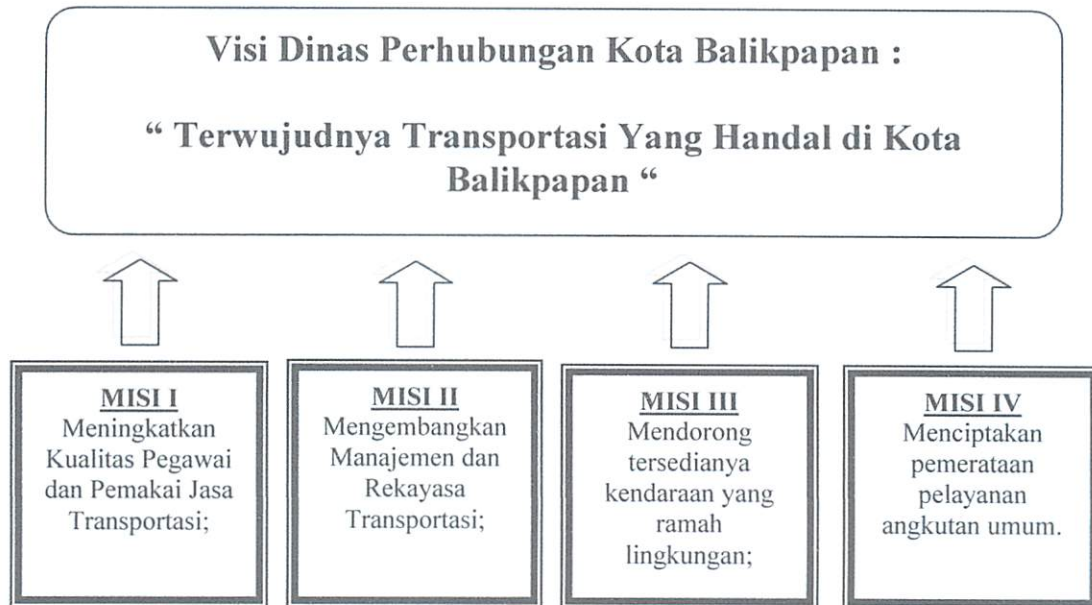


2. Misi

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pegawai dan Pemakai Jasa Transportasi;
2. Mengembangkan Manajemen dan Rekayasa Transportasi;
3. Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan;
4. Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum.

Hubungan antara misi dan visi yang telah ditetapkan akan nampak seperti dalam gambar berikut :



b. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan tujuan sebagai berikut:

NO	MISI	TUJUAN STRATEGIK
1	Meningkatkan Kualitas dan pegawai dan pemakai jasa transportasi	Meningkatnya kinerja pegawai, meningkatnya kinerja pemakai jasa transportasi
2	Mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi	Meningkatnya kinerja transportasi dikota Balikpapan
3	Mendorong tersedianya kendaraan yang ramah lingkungan	Terciptanya kelestarian lingkungan hidup
4	Menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum	Meningkatnya pelayanan perizinan, Terwujudnya pelayanan angkutan umum sehingga menjangkau seluruh wilayah

2. Sasaran

Sasaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIK	SASARAN SATRATEGIK
1.	Meningkatnya Kinerja Pegawai	1. Meningkatnya Kemampuan dan disiplin pegawai 2. Menigkatnya kesehjahteraan pegawai
2.	Meningkatnya kinerja pemakai jasa transportasi	1. Meningkatnya kemampuan dan disiplin pemakai jasa transportasi 2. Meningkatnya kesehjahteraan pegemudi dan operator jasa transportasi
3.	Meningkatnya kinerja transportasi dikota Balikpapan	1. Tersedianya perencanaan transportasi yang matang 2. meningkatnya kinerja prasarana transportasi yang mantap 3. meningkatnya kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi
4.	Terciptanya kelestarian lingkungan hidup	1. Tersedianya kendaraan yang layak jalan dan ramah lingkungan

c. Strategi dan Kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan Kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan dan rencana kinerja tahun 2013 seperti di bawah ini.

1. Strategi dan Kebijakan

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk Kebijaksanaan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memiliki 18 (delapan belas) Kebijaksanaan resmi, yaitu:



1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai yang memenuhi persyaratan
2. Melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai
3. Menetapkan batas waktu penyerahan hak pegawai.
4. Mengadakan prasarana dan sarana pegawai.
5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai.
6. Melaksanakan sosialisasi/kampanye
7. Memberikan kesempatan kepada pengemudi/notaris yang memenuhi syarat.
8. Melaksanakan penertiban.
9. Melakukan pembuatan rencana dan evaluasi transportasi
10. Mengadakan pemeliharaan dan penambahan fasilitas lalu lintas
11. Mengadakan penataan lalu lintas dan angkutan barang
12. Melakukan pengawasan dan memenuhi peralatan yang diperlukan
13. Menempatkan petugas parkir pada lokasi yang diperlukan
14. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan menyiapkan alat yang diperlukan
15. Menetapkan standar pelayanan
16. Menyiapkan jaringan trayek kendaraan yang diperlukan
17. Memberikan pelayanan bagi penumpang dan kendaraan umum

2. Program Operasional

Kebijaksanaan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menetapkan program operasional sebanyak 11 (sebelas) program resmi, yaitu :

1. Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
5. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
6. Peningkatan pelayanan angkutan
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
8. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
9. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
10. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
11. Pengawasan angkutan laut

3. Kegiatan

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan - kegiatan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2013 meliputi:

1. Mengikutsertakan pegawai mengikuti Diklat Struktural.
2. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan S1, S2.
3. Studi Banding.
4. Seminar/Lokakarya/Diskusi panel/dialog interaktif/Workshop.
5. Rapat staf secara berkala.
6. Merencanakan klasifikasi staf sesuai dengan job descriptionnya.
7. Mengusulkan perencanaan penambahan staf.
8. Penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya.
9. Penataan kearsifan dan naskah.
10. Pengaturan administrasi surat menyurat dan tata naskah.
11. Menghimpun data-data pegawai Dinas Perhubungan.
12. Peremajaan Data Kepegawaian.
13. Komputerisasi data-data kepegawaian.
14. Penyusunan anggaran Dinas Perhubungan
15. Komputerisasi data keuangan.
16. Pemeriksaan dokumen sebelum dan sesudah proses bendaharawan.
17. Sosialisasi tata administrasi keuangan pada stake holder.
18. Tata administrasi barang.
19. Inventarisasi sarana dan prasarana penunjang kebutuhan Dinas Perhubungan.
20. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kepada instansi terkait.
21. Penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
22. Pengadaan buku-buku dan peraturan penunjang kegiatan Dinas Perhubungan
23. Meminta data ke instansi terkait sesuai dengan permasalahan/pengaduan yang masuk.



d. Rencana Kinerja Tahun 2013

Rencana kinerja untuk program kegiatan juga didefinisikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

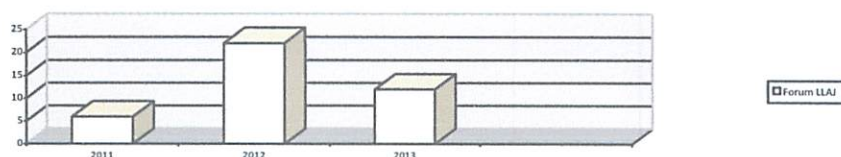
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja atas beberapa kegiatan dan program yang telah dilaksanakan di Tahun 2013. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013, mencakup Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Realisasi Target dan persentase perbandingan antara target dan realisasi dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PKK)

Penetapan Kinerja Tahun 2013 memiliki Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Program serta Kegiatan yang terdapat pada lampiran, berikut adalah pencapaian sasaran Tahun 2013 :

SASARAN 1 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Sasaran ini di capai melalui program peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Meningkatkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.	12 Kali	12 Kali	100 %



Grafik 1. Pencapaian kinerja Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

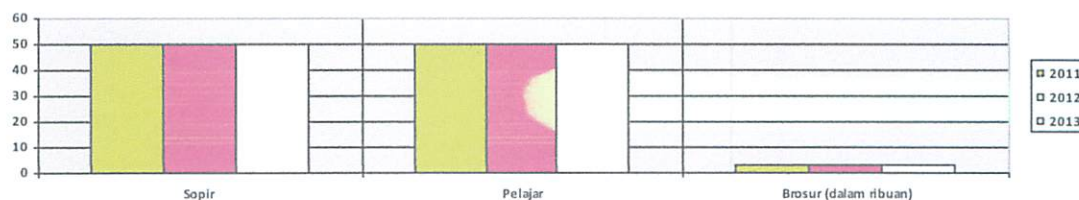
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pengembangan kapasitas sumber daya Manusia Dinas perhubungan mengalami penurunan, hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah terbatasnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas di bidang perhubungan.

SASARAN 2 Peningkatan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan pelayanan angkutan jalan yang operasionalisasinya di dukung dengan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan umum teladan dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan angkutan jalan, pada program peningkatan dan pengamanan lalu lintas didukung dengan dua kegiatan yaitu pembuatan brosur, banner, pamflet dan buku tentang lalu lintas yang dapat juga di lihat pada profil dan web site Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, adapun capaiannya adalah

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2. Peningkatan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi	1. Jumlah peserta dalam pelaksanaan sosialisasi/ kampanye	50 Sopir 50 Pelajar	50 Sopir 50 Pelajar	100 %
	2. Jumlah media sosialisasi	1100 buah Brosur, 20 buah Banner, 2 buah Banner Bingkai, 1000 Stiker, 220 buah BukuSaku Tertib lalin dan 5 buah Spanduk	1100 buah Brosur, 20 buah Banner, 2 buah Banner Bingkai, 1000 Stiker, 220 buah BukuSaku Tertib lalin dan 5 buah Spanduk	100 %
	3. Jumlah Media Informasi Dinas Perhubungan	20 buku dan DVD profil Dishub	20 buku dan DVD profil Dishub	100 %

Pencapaian sasaran menurut data diatas telah dengan menyediakan berbagai jenis pakaian dinas.





Grafik 2. Pencapaian kinerja Peningkatan pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi

SASARAN 3 Peningkatan Perencanaan transportasi yang terarah

Sasaran ini di capai dengan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan survey lintas harian rata-rata, Program pengadaan sarana dan prasarana perhubungan dengan kegiatan pembangunan gedung pusat pengendali ATCS, program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan survey load faktor dan pengamann dan pengendalian parkir, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas yang operasionalnya dengan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perlengkapan Jalan
2. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
3. Monitoring Pengelolaan Terminal

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3. Peningkatan Perencanaan Transportasi yang Terarah	1. Jumlah Titik Pantau Lintas Harian Rata-rata	30 ruas jalan kota	30 ruas jalan kota	100 %
	2. Jumlah Pusat Pengedali Lalu Lintas	1 gedung ATCS	1 gedung ATCS	100 %
	3. Rencana dan Evaluasi Penataan Angkutan Kota	1950 Angkot	1950 Angkot	100 %
	4. Jumlah petugas parkir dan jumlah lokasi parkir	21 lokasi Parkir	21 lokasi Parkir Seluruh	100 %
	5. Jumlah titik pantau perlengkapan jalan	Seluruh ruas jalan kota	Seluruh ruas jalan kota	100 %
	6. Jumlah Titik Pantau Lalu Lintas Angkutan Jalan	90 % persimpangan arus padat kendaraan	80 % persimpangan arus padat kendaraan	90%
	7. Jumlah Keluar Masuk BUS, dan Angkutan Umum Luar Kota	Terminal batu ampar dan terminal damai	Terminal batu ampar dan terminal damai	84,62

SASARAN 4 Peningkatan kinerja transportasi

Sasaran ini berisikan 5 (lima) Indikator Kinerja yang pencapaiannya ditunjang oleh program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang operasionalnya bertumpu pada kegiatan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, Selain Program diatas pencapaian sasaran ini juga berpengaruh pada program peningkatan dan pengamanan lalu lintas yang berisikan beberapa kegiatan antara lain :

1. Pengadaan dan operasional Sarana Lalu Lintas angkutan jalan;
2. Pemeliharaan Gedung Terminal;
3. Monitoring Integritas Program, Update data pada Program ATCS;
4. Pelaksanaan Lomba Tertib LLAJ Tingkat Nasional;
5. Sosialisasi keselamatan lalu lintas kesekolah-sekolah;
6. Pengadaan alat pendukung pengendalian operasi;

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4. Peningkatan kinerja transportasi	1. Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	1 paket taman lalin , 1 Paket Tiang APILL, 100 buah Rambu, Box APILL dan ATCS, 1799 m2, 750 m2, 6500 m2, 7716 m2	1 paket taman lalin , 1 Paket Tiang APILL, 100 buah Rambu, Box APILL dan ATCS, 1799 m2, 750 m2, 6500 m2, 7716 m2	90
	2. Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas angkutan jalan	70 Buah Rambu, 50 Buah Daun Rambu 15 Buah waterblock 1 unit alat penghapus marka 1 paket warning light	70 Buah Rambu, 50 Buah Daun Rambu 15 Buah waterblock 1 unit alat penghapus marka 1 paket warning light	85
	3. Jumlah Pemeliharaan prasarana lalu lintas angkutan jalan	Terminal Angkutan dalam kota	Terminal Angkutan dalam kota	90
	4. Jumlah titik pengawasan lalu lintas	14 ATCS	14 ATCS	



		5.	Piala Wahana Tata Nugraha (WTN)	Piala Wahana Tata Nugraha	Piala Wahana Tata Nugraha	100
		6.	Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas	1250 siswa sekolah	1250 siswa sekolah	100
		7.	Jumlah alat pendukung pengendali dan operasi			100

Sasaran Peningkatan Kinerja Sarana dan Prasarana Transportasi dengan indikator-indikator serta diatas dapat terealisasi dengan baik, dimana sebagai penunjang keamanan, ketertiban lalu lintas angkutan jalan.

SASARAN 5 Peningkatan Kesiapan Petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan Operasionalisasinya melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

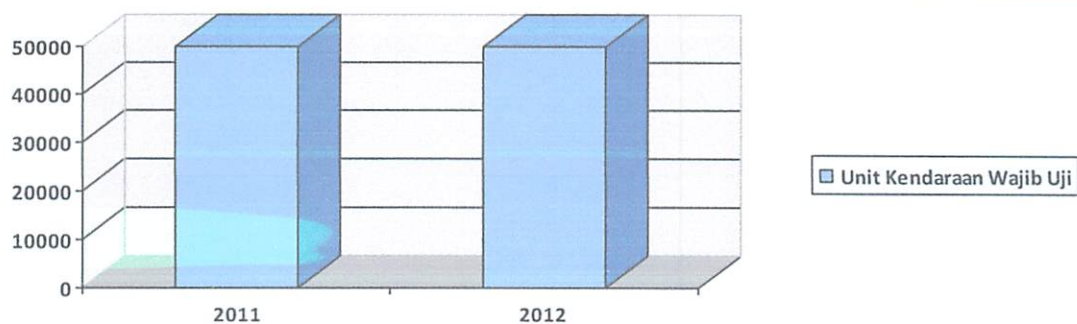
1. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan hari-hari besar dan Keagamaan
2. Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5. Peningkatan Kesiapan Petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi	1. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar nasional dan keagamaan.	2 kali Hari raya Idul Fitri dan Natal	2 kali Hari raya Idul Fitri dan Natal	100
	2. Jumlah kegiatan Pemeriksaan Kendaraan	11 kali pemeriksaan kendaraan	11 kali pemeriksaan kendaraan	100
	3. Jumlah terminal angkutan barang	1 buah dokumen DED terminal angkutan barang	1 buah dokumen DED terminal	100
	4. Volume pagar terminal penumpang type A Batu Ampar	P : 472 M L : 3 M	P : 472 M L : 3 M	100
	5.			100
	6.			

SASARAN 6 Peningkatan Kendaraan yang Laik Jalan dan Ramah Lingkungan

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas yang operasionalnya melalui kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dimana sesuai tabel dibawah bahwa ditargetkan 50,000 kendaraan di uji apada UPT PKB Dinas Perhubungan kota Balikpapan dan terealisasi seratus persen.

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6. Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan	1. Jumlah Kendaraan yang diuji, jumlah pendapatan dan jumlah alat yang diperlukan	50.000 kendaraan 2 kali 25.000 kendaraan wajib uji	50.000 kendaraan 2 kali 25.000 kendaraan wajib uji	100



Grafik 5. Pengujian Kendaraan Bermotor



SASARAN 7. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal

Sasaran ini di capai melalui program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang operasionalisasinya bertumpu pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum massal, dimana pencapaian sesuai dengan tabel diatas.

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7. Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal	1 Jumlah Koridor, Kendaraan yang melayani dan jumlah halte	1 koridor, 2 Unit Bus SAUM dan 4 halte	1 koridor, 2 Unit Bus SAUM dan 4 halte	100

SASARAN 9. Pengembangan Kawasan Terminal

Sasaran yang di tunjang dengan program peningkatan pelayanan angkutan belum dapat terealisasi, dikarenakan unruk terminal angkutan barang masih dalam proses pembebasan lahan jalan menuju kawasan moleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan untuk pendampingan Re-design Terminal Batu Ampar, bersamaan dengan pembangunan fisik terminal Batu Ampar.

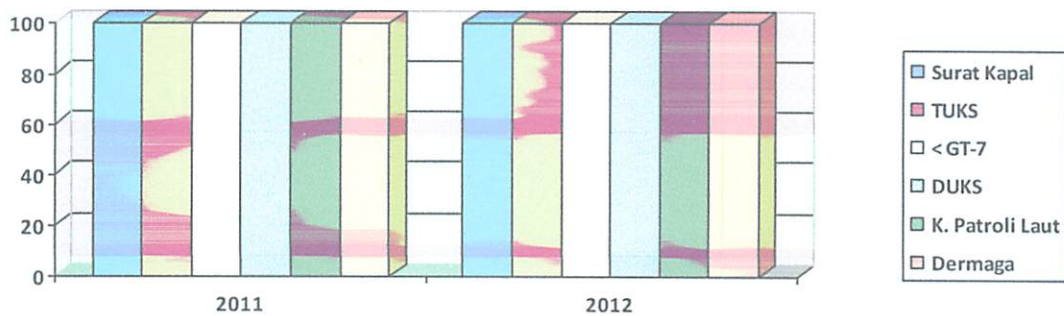
SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9. Pengembangan Kawasan Terminal	1 Jumlah Terminal Angkutan Barang	1 buah dokumen DED Terminal Angkutan Barang	1 buah dokumen DED Terminal Angkutan Barang	100
	2 Volume pagar Terminal Penumpang Type A	Pagar terminal P = 472,42 M L = 3 M	Pagar terminal P = 472,42 M L = 3 M	100

SASARAN 9. Peningkatan Keselamatan Pengguna Lalulintas Laut dan Pelayanan di Terminal/ Pelabuhan dan Dermaga

Sasaran ini di capai melalui program peningkatan sarana dan prasarana laut yang operasionalisasinya melalui kegiatan-kediatan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas Angkutan Laut
 2. Monitoring Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)
 3. Operasional pemeriksaan lalu lintas angkutan laut dibawah GT-7
 4. Operasional Pemeliharaan Kapal Patroli lalulintas laut
 5. Pemeliharaan dan pengadaan fasilitas dermaga Kampung Baru Tengah.
- Dengan hasil realisasi rata-rata 100% (seratus persen)

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9. Peningkatan Keselamatan Pengguna Lalu lintas Laut dan pelayanan di Terminal/ Pelabuhan/ Dermaga	1 Jumlah Kapal yang habis masa berlaku ijin pengoperasiannya	152 speed boat 6 klotok 300 kapal nelayan	152 speed boat 6 klotok 300 kapal nelayan	100
	2 Pengguna TUKS Kepelabuhanan yang tidak memiliki ijin dan Dermaga	48 TUKS	48 TUKS	100
	3 Jumlah kapal di bawah GT-7 yang tidak lengkap surat perijinannya	293 kapal dibawah GT-7	293 kapal dibawah GT-7	100
	4 Jumlah Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS)	14 DUKS	14 DUKS	100
	5 Jumlah Sarana Patroli Laut	1 Kapal patroli	1 Kapal patroli	100
	6 Jumlah sarana Perhubungan Laut	1 buah dermaga	1 buah dermaga	100



Grafik 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut

SASARAN 10. Peningkatan PAD Sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi

Sasaran ini di tunjang dengan program peningkatan dan pengawasan sarana dan prasarana telekomunikasi yang operasionalisasinya pada kegiatan pengawasan dan pendataan menara telekomunikasi di Kota Balikpapan yang bertujuan untuk menarik retribusi pegendalian menara telekomunikasi sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah di sector perhubungan khususnya bidang pos dan telekomunikasi.

SASARAN	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11. Peningkatan PAD di sektor Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi	1 Jumlah menara wajib retribusi	6.029.557.800	5.558.740.700	92,19

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Rp.14.617001.700,-

Jumlah Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2013 Rp. 2.493.252.661,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 Rp. 14.855.878.039,-

Interprestasi capaian kinerja berdasarkan sumber Standar Lembaga dministrasi Nasiaonal (LAN) Nomor: 589/IX/6/V/2009 Tanggal 20 September 1999, adalah :

- 85 s/d 100 : Sangat berhasil
- 70 s/d 85 : Berhasil
- 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
- Kurang dari 55 : Tidak Berhasil

ASPEK KEUANGAN

Dari aspek keuangan Anggaran Tahun 2013, maka alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Balikpapan adalah sebesar 14.617001.700,-, untuk merealisasikan 14 program yaitu : *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran* sebesar Rp. 1,688.700.200,- , *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur* sebesar Rp. 630.884.000,- , *Program Peningkatan Disiplin Aparatur* sebesar Rp. 360.000.000,-, *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur* sebesar Rp. 50.000.000,-, *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan* Rp. 25.463.000,-, *Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ* sebesar Rp. 1.863.500.400,- , *Program Peningkatan Pelayanan Angkutan* sebesar Rp. 5.132.259.000,- , *Program Pembangunan Saran dan Prasarana Perhubungan* Rp. 1.962.055.000,- , *Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas* sebesar Rp. 1.329.449.100,- , *Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor* sebesar Rp. 1.141.000.000,- , *Program Pengembangan Data/ Informasi* Rp. 75.000.000,- , *Program Perencanaan Pembangunan Daerah* Rp. 10.000.000 :

Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sebesar Rp.9.644.272.000,- dari jumlah dana sebesar Rp. 11.016.454.000,- atau dapat dikatakan 95,24% dapat di realisasikan, sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp. 14.855.878.039,- dari jumlah dana 17.349.130.700,- atau berhasil diserap 85,63%.

Perbedaan pagu anggaran diawal tahun anggaran 2013 dan diakhir tahun anggaran 2013 di karenakan adanya APBD-Perubahan, berikut kami sampaikan realisasi anggaran setiap sasaran dan program serta kegiatan pada lampiran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 589/IX/6N/99 tanggal 20 September 1999, Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tahun 2013 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan, program yang diimplementasikan melalui kegiatan sesuai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Secara keseluruhan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Balikpapan ini dapat dikatakan berhasil dimana akuntabilitas fisik adalah sebesar 95,74%, sementara itu capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 85,63%, namun kami menyadari ada beberapa sasaran, program dan kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal dan untuk Tahun 2013 sasaran-sasaran yang belum dapat direalisasikan pada Tahun 2013 akan direalisasikan dengan cara memaksimalkan kinerja aparatur, sehingga pengguna kepentingan dalam hal ini masyarakat umum dapat segera merasakan manfaatnya.

Secara umum, pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan Laporan AKIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ruhui Rahayu I No.5 Telepon (0542) 87629, Fax.(0542) 876290 Balikpapan

Kode Pos 76114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : UM.003/0288/Dishub-Bpp/2013

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukantolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 – 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan 2011 – 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Perda Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan;
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indicator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

Pasal 2

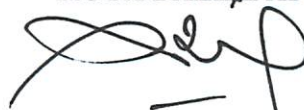
Unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indicator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : Januari 2014

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN**



SUSENO, A.TD

Pembina Utama Muda
NIP. 196305051983031012

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR :
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
Tugas :
Fungsi :
Indikator Kinerja Utama : Bidang Perhubungan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/ SUMBER DATA
1	Pengembangan Pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi	1 1 Jumlah Peserta dalam pelaksanaan sosialisasi / kampanye	DISHUB
2	Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi	2 1 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar dan keagamaan	
3	Peningkatan Perencanaan transportasi yang	3 1 Jumlah Media Informasi Dinas Perhubungan 2 Jumlah Titik Pantau Lintas Harian Rata-rata 3 Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi pelayaran	IKU Kota
4	Peningkatan kinerja prasarana transportasi	4 1 Jumlah Keluar masuk bus, angkutan umum luar kota 2 Jumlah Operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia) 3 Jumlah sarana pendukung operasional 4 Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir 5 Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring ATCS 6 Jumlah pemeliharaan lalu lintas angkutan jalan 7 Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu lintas 8 Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas	IKU Kota IKU Kota IKU Kota
5	Peningkatan koordinasi antar insansi/ lembaga	5 1 Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan	
6	Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan	6 1 Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan	IKU Kota
7	Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal	7 1 Jumlah Koridor, kendaraan yang melayani angkutan Umum Massal dan Jumlah Halte	IKU Kota
8	Peningkatan Keselamatan Pengguna lalu lintas	8 1 Jumlah Prasaran Perhubungan Laut 2 Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kapal	IKU Kota
9	Penataan Menara/ Tower Telekomunikasi dan	1 Jumlah menara/ Tower dan Jasa Titipan	
10	Peningkatan PAD di sektor Perhubungan , Pos dan Telekomunikasi	10 1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah	

Balikpapan, Januari 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA Balikpapan

SUSENO, A.Td
NIP. 19630505 198303 1 002

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013

NO	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI			SISA DANA (Rp)	KET.
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	(%)		
1	3	4	6	8	9(8/4X100%)	10(4-8)	11
1	Belanja Langsung	17,349,130,700.00	93.83	Rp 13,567,950,564.00	78.2	Rp 3,781,180,136	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	100	3,161,500.00	63.2	Rp 1,838,500	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	404,400,200.00	95	390,830,400.00	96.6	Rp 13,569,800	Perubahan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,500,000.00	90	10,761,000.00	93.6	Rp 739,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	411,800,000.00	100	327,817,730.00	79.6	Rp 83,982,270	Perubahan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	70,000,000.00	100	68,833,600.00	98.3	Rp 1,166,400	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	744,460,000.00	100	739,312,000.00	99.3	Rp 5,148,000	Perubahan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	100,000,000.00	100	98,500,000.00	98.5	Rp 1,500,000	
	Penyediaan makanan dan minuman	170,000,000.00	95	168,124,500.00	98.9	Rp 1,875,500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	140,000,000.00	100	139,204,200.00	99.4	Rp 795,800	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	174,506,000.00	100	166,403,600.00	95.4	Rp 8,102,400	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,000,000.00	100	24,770,000.00	99.1	Rp 230,000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	95,000,000.00	100	94,186,000.00	99.1	Rp 814,000	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	450,000,000.00	95	435,970,300.00	96.9	Rp 14,029,700	
	Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur	50,000,000.00	100	43,057,100.00	86.1	Rp 6,942,900	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	360,000,000.00	100	356,781,500.00	99.1	Rp 3,218,500	
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10,000,000.00	100	1,490,000.00	14.9	Rp 8,510,000	
	Pendamping Re Design Terminal Batu Ampar dari Type B ke Type A	2,417,690,000.00	100	2,184,676,000.00	90.4	Rp 233,014,000	
	Pembangunan Gedung Pusat Pengendali Lalu Lintas	962,055,000.00	100	847,946,000.00	88.1	Rp 114,109,000	
	Penyusunan Profil dan Informasi Transportasi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	75,000,000.00	100	66,082,700.00	88.1	Rp 8,917,300	
	Penyusunan DED Terminal Angkutan Barang	600,000,000.00	100	542,333,000.00	90.4	Rp 57,667,000	

	Survei Lintas Harian Rata-rata (LHR)		25,463,000.00	100	23,786,000.00	93.4	Rp	1,677,000	
	Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan		2,093,500,400.00	100	1,897,482,773.00	90.6	Rp	196,017,627.00	Perubahan
	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas ke Sekolah-sekolah		31,370,000.00	100	24,037,000.00	76.6	Rp	7,333,000.00	
	Pengadaan dan Operasional Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan		267,208,350.00	100	247,099,325.00	92.5	Rp	20,109,025.00	
	Monitoring integritas program, Update data pada program ATCS		61,007,000.00	100	59,565,000.00	97.6	Rp	1,442,000	
	Pembuatan brosur, banner, stiker, pamflet dan buku tentang lalu lintas		30,250,000.00	100	18,648,250.00	61.6	Rp	11,601,750	
	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perlengkapan Jalan.		47,791,250.00	100	28,920,500.00	60.5	Rp	18,870,750	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		191,698,000.00	60	66,738,800.00	34.8	Rp	124,959,200	
	Operasi Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia)		175,000,000.00	100	131,789,400.00	75.3	Rp	43,210,600	
	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan LL Angkutan Jalan		500,000,000.00	100	270,907,000.00	54.2	Rp	229,093,000	
	Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian dan Operasi		319,602,500.00	100	249,166,000.00	78.0	Rp	70,436,500	Perubahan
	Pengadaan Kendaraan Pendukung Operasional		1,610,000,000.00	100	143,095,300.00	8.9	Rp	1,466,904,700	Perubahan
	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan		78,305,000.00	100	59,513,250.00	76	Rp	18,791,750	
	Survey Load Factor		21,542,000.00	100	21,165,400.00	98.3	Rp	376,600	
	Pengamanan dan Pengendalian Parkir		767,402,000.00	100	739,423,250.00	96.4	Rp	27,978,750	
	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan		100,000,000.00	85	97,638,100.00	97.6	Rp	2,361,900	
	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan		72,320,000.00	100	55,294,800.00	76.5	Rp	17,025,200	
	Evaluasi Pengelolaan Terminal		107,680,000.00	100	93,063,900.00	86.4	Rp	14,616,100.00	
	Pemeliharaan Gedung Terminal Kerb/Marka		45,000,000.00	100	43,453,961.00	96.6	Rp	1,546,039	
	Operasional Sarana Angkutan Umum Massal		1,500,000,000.00	100	1,195,290,750.00	79.7	Rp	304,709,250	
	Peningkatan Prasarana Angkutan Umum Massal		400,000,000.00	0	-	0.0	Rp	400,000,000	
	Monitoring Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Kepelabuhanan.		30,000,000.00	100	10,736,100.00	35.8	Rp	19,263,900	
	Pemeliharaan Fasilitas Dermaga		75,000,000.00	100	50,788,825.00	67.7	Rp	24,211,175	
	Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan laut	Rp	120,080,000	95	Rp 91,903,550	76.5	Rp	28,176,450	
	Operasional Pemeriksaan Lalu Lintas Angkutan Laut di bawah GT.7	Rp	75,000,000	95	Rp 59,501,750	79.3	Rp	15,498,250	
	Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut	Rp	186,500,000	100	Rp 183,350,225	98.3	Rp	3,149,775	Perubahan
	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	1,141,000,000	100	Rp 995,350,225	87.2	Rp	145,649,775	
	JUMLAH SELURUHNYA	Rp	17,349,130,700	93.83	Rp 13,567,950,564.00	78.21	Rp	3,781,180,136	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUSENO**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. mewujudkan target kinerja tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan anggaran;
2. mewujudkan Balikpapan sebagai kawasan Zona Integritas melalui :
 - a. Komitmen SKPD yang bersih dan bebas KKN;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur serta tertib administrasi pada SKPD.
3. menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana point 1 dan 2 per 3 bulan kepada Walikota.

Indikator capaian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 di atas adalah terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar perjanjian ini.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Januari 2013

Pihak Kedua,

H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

SUSENO

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas perhubungan Kota Balikpapan
: 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi	1 Jumlah Peserta dalam pelaksanaan sosialisasi / kampanye	- 30 Sopir Angkutan Umum - 30 Pelajar	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Angkutan Jalan	Rp 160,000,000
2	Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi	2 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Hari-hari besar dan keagamaan	- 2 kegiatan	- Pengawasan dan Pengendalian Hari-hari Besar dan keagamaan	Rp 400,000,000
3	Peningkatan Perencanaan Transportasi yang terarah	1 Jumlah Media Informasi Dinas Perhubungan	- Buku Profil dan Web Site	Program Pengembangan Data dan Informasi Perhubungan - Penyusunan Profil Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Up date Web Site Dinas perhubungan Kota Balikpapan	Rp 70,000,000
		2 Jumlah Titik Pantau Lintas Harian Rata-rata	- 30 Ruas Jalan Kota	Survey Lintas Harian Rata-rata (LHR)	Rp 80,000,000
		3 Jumlah lalu lintas angkutan dan Kajian Regulasi pelayaran	- 512 unit, 152 unit, 60 unit, 300 unit dan 1 dokumen	Survey Lintas Laut dan Kajian Regulasi Pelayaran	Rp 100,000,000
4	Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi	1 Jumlah Keluar Masuk BUS, dan Angkutan Umum Luar Kota	- Terminal Batu Ampar dan Terminal Damai	Program Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Kota - Pengelolaan Terminal	Rp 300,000,000
		2 Jumlah Operasional Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia)	- 66 kali razia	Operasional Pemeriksaan Lalu Lintas (Razia) dan Pengawasan , Pengendalian, Monitoring dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 700,000,000
		3 Jumlah Sarana Pendukung Operasional	- 1 unit kendaraan derek	Pengadaan Kendaraan dan Alat Pendukung	Rp 900,000,000
		4 Jumlah petugas parkir dan jumlah lokasi parkir	- 21 Lokasi	- Pengamanan dan Pengendalian Parkir	Rp 900,000,000
		5 Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan Monitoring ATCS	- Seluruh Ruas Jalan Kota dan 14 ATCS	- Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Perlengkapan Jalan dan ATCS	Rp 124,000,000

		1 Jumlah Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas angkutan	- 1 paket taman lalin , alat APILL, 100 buah Rambu, Alat APILL dan ATCS, 3.000 m2, 14.375 m2, 226 m2	Program pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 2,500,000,000
		1 Jumlah siswa yang paham tentang Keselamatan Lalu Lintas	1 X SMP, 4 X SMA, 1 X SMK, 7 X Kelurahan	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Sosialisasi Keselamatan lalu Lintas Ke sekolah-sekolah	Rp 50,000,000
		1 Jumlah Pengadaan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	- 143 Buah Rambu Lalu Lintas, 121 Rambu papan nama , 2 buah box apill, 15 Buah waterblock, 15 baterai buck up APILL, 36 unit traffic Cone, 1 buah GPS, 10 unit road barrier lipat, 13 unit portal	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas - Pengadaan Sarana lalu Lintas Angkutan Jalan	Rp 746,000,000
5	Peningkatan Koordinasi Antar Instansi/Lembaga	2 Jumlah Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	- 5 Kali Kegiatan Forum LLAJ	- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 224,000,000
6	Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan	1 Jumlah kendaraan yang diuji dalam Tahun Berjalan	- 2 kali uji (29000 Unit Kendaraan Bermotor Wajib Uji)	Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1,550,000,000
7	Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal	1 Jumlah Koridor, kendaraan yang melayani angkutan Umum Massal dan Jumlah Halte	- 2 Unit Bus SAUM dan 4 halte	Program Pengembangan Transportasi Kota Balikpapan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp 2,600,000,000
8	Peningkatan Keselamatan Pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di Terminal/Pelabuhan/ Dermaga	1 Jumlah Prasarana Perhubungan Laut	- 2 Pelabuhan dan 42 TUKS	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan - Pemeliharaan Fasilitas Dermaga Kp. Baru Tengah dan Monitoring TUKS dan Kepelabuhan	Rp 155,000,000
		2 Jumlah Operasional dan Pemeliharaan kapal	- 1 paket	Program Peningkatan Pelayanan Laut - Operasional, Pemeliharaan Kapal Patroli dan Perlengkapan Lalu Lintas Laut	Rp 400,000,000

9	Penataan Menara/Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan	1 Jumlah Menara/Tower dan jasa titipan	- 246 Menara dan 45 Usaha Jasa Titipan	Program Peningkatan dan Pengawasan POS, Telekomunikasi dan Informatika - Audit Menara Telekomunikasi dan Pengendalian Jasa Titipan	Rp 270,000,000
10	Peningkatan PAD di sektor Perhubungan dan Telekomunikasi	1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah	- Rp 8,285,000,000	Restribusi Daerah - Hasil Restribusi Daerah	

Jumlah Anggaran

Rp. 16.407.103.750,-

Program Urusan Perhubungan

Rp. 12.229.000.000,-



Balikpapan, 27 Januari 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BALIKPAPAN

SUSENO, A.TD

NIP. 196305051983031012

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
Tugas :
Fungsi :
Indikator Kinerja Utama : Bidang Perhubungan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN/ SUMBER DATA
1	Pengembangan Pengetahuan dan disiplin pengguna jasa transportasi	1 1 Jumlah Peserta dalam pelaksanaan sosialisasi / kampanye	DISHUB
2	Peningkatan kesiapan petugas pada daerah rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan transportasi	2 1 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hari-hari besar dan keagamaan	
3	Peningkatan Perencanaan transportasi yang terarah	3 1 Jumlah Media Informasi Dinas Perhubungan 2 Jumlah Titik Pantau Lintas Harian Rata-rata 3 Jumlah lalu lintas angkutan dan kajian regulasi pelayaran	IKU Kota
4	Peningkatan kinerja prasarana transportasi	4 1 Jumlah Keluar masuk bus, angkutan umum luar kota 2 Jumlah Operasional pemeliharaan lalu lintas (Razia) 3 Jumlah sarana pendukung operasional 4 Jumlah petugas parkir dan lokasi parkir 5 Jumlah titik pantau perlengkapan jalan dan monitoring 6 Jumlah pemeliharaan lalu lintas angkutan jalan 7 Jumlah siswa yang paham tentang keselamatan lalu 8 Jumlah pengadaan prasarana lalu lintas	IKU Kota IKU Kota IKU Kota
5	Peningkatan koordinasi antar insansi/ lembaga	5 1 Jumlah forum lalu lintas angkutan jalan	
6	Peningkatan kendaraan yang laik jalan dan ramah lingkungan	6 1 Jumlah kendaraan yang diuji dalam tahun berjalan	IKU Kota
7	Pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal	7 1 Jumlah Koridor, kendaraan yang melayani angkutan Umum Massal dan Jumlah Halte	IKU Kota
8	Peningkatan Keselamatan Pengguna lalu lintas laut dan pelayanan di Terminal/Pelabuhan/ Dermaga	8 1 Jumlah Prasaran Perhubungan Laut 2 Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Kapal	IKU Kota
9	Penataan Menara/ Tower Telekomunikasi dan Jasa Titipan	1 Jumlah menara/ Tower dan Jasa Titipan	
10	Peningkatan PAD di sektor Perhubungan , Pos dan Telekomunikasi	10 1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah	

Balikpapan, Januari 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA Balikpapan

SUSENO, A.Td
NIP. 19630505 198303 1 002